

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Secara keseluruhan prinsip *Good Governance* diterapkan secara maksimal oleh Kabupaten Sleman. Pada tahap Perencanaan, Pertanggungjawaban serta Pengawasan seluruh prinsip *Good Governance* telah diterapkan dan dilaksanakan dengan baik. Namun pada tahap Pelaksanaan Keuangan Daerah masih diperlukan perbaikan pada prinsip Transparansi, hal tersebut dikarenakan pelaksanaan transparansi pada tahap pelaksanaan keuangan daerah masih sebatas publikasi terhadap lelang dengan nilai kontrak diatas 200 juta rupiah tidak berupa publikasi anggaran setiap program. Disamping hal tersebut penerapan prinsip *Good Governance* pada tahap Pelaksanaan Keuangan Daerah telah dijalankan dengan baik. Selanjutnya penerapan prinsip *Good Governance* pada tahap Penatausahaan Keuangan Daerah di Kabupaten Sleman juga belum dijalankan secara keseluruhan, khususnya pada prinsip Transparansi. Berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa transparansi pada tahap Penatausahaan tidak dilaksanakan karena penatausahaan lebih mengedepankan pencatatan - pencatatan setiap kegiatan dalam pengelolaan keuangan daerah yang nantinya dijadikan sebagai dokumen untuk pelaporan atau pertanggungjawaban, dengan demikian publikasi pada tahap tersebut bukan merupakan prioritas. Pada tahap Pelaporan, prinsip Transparansi juga harus diperbaiki karena publikasi yang dilakukan pada website Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman masih pemberian informasi Laporan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2015

## **B. SARAN**

Kabupaten Sleman telah menerapkan Prinsip *Good Governance* secara maksimal dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, namun terdapat hal yang perlu diperbaiki untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab dan terbuka. Perbaikan tersebut harus dilakukan pada penerapan Prinsip Transparansi dengan tujuan agar masyarakat memiliki akses untuk mendapatkan informasi seluas – luasnya mengenai setiap kegiatan dalam siklus pengelola keuangan daerah. Contohnya pemberian informasi mengenai APBD supaya masyarakat mengetahui prioritas program serta pendanaannya, ataupun contoh lain adalah pemberian informasi mengenai Pelaksanaan Penggunaan Anggaran untuk mengetahui apakah program tersebut menghabiskan dana terlalu besar atau tidak. Pada website Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman harus segera dilakukan pembaruan pada menu Transparansi Anggaran, karena informasi yang disajikan masih Tahun Anggaran 2015.